

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin**

Nama daerah Kuin yang dikepalai oleh Patih Masih yang berasal dari Desa Oloh Masih memunculkan Kota Banjarmasin yang dahulu dikenal dengan Kota Tatas. Belakangan pemukiman Oloh Masih ini menjelma menjadi desa Banjarmasin yang di wilayah ini dikuasai oleh Pangeran Samudera, pangeran Kerajaan Daha. Setelah itu berdirilah Kerajaan Banjar yang kemudian menaklukkan Muaran Baan dan menjadikan sungai tersebut sebagai jalur niaga. Setelah menganut prinsip Islam, Kerajaan Banjar yang sempat mendapat ancaman dari Kerajaan Demak akhirnya membentuk aliansi. Kemudian keduanya menyerang Daha dan merebut kekuasaan atasnya. Kota Banjarmasin memperingati hari tanggal 24 September 1526/6 Dzulhijjah 932 H, ketika Pangeran Samudera masuk Islam dan menyandang gelar Sultan Suriansyah. Banjarbaru mengambil posisi Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Secara astronomis, Kota Banjarmasin terletak antara  $3^{\circ}16'46''$  dan  $3^{\circ}22'54''$  Lintang Selatan dan antara  $114^{\circ}31'40''$  dan  $114^{\circ}39'55''$  Bujur Timur, menurut informasi yang diberikan Pemerintah Kota dan termasuk dalam Angka BPS 2022. Letak Kota Banjarmasin menempatkannya di bawah Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah 98,46 kilometer persegi, terbagi menjadi lima kabupaten kecil. Berikut daftar kecamatan di Kota Banjarmasin: Banjarmasin Selatan, Timur, Barat, Tengah, dan Utara. Secara geografis Kota Banjarmasin

berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di utara, Kabupaten Banjar di timur, Kabupaten Banjar di barat, dan Kabupaten Banjar di selatan.

Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai ini dilalui oleh banyak sungai, termasuk sungai Barito dan Martapura. Banjarmasin telah menjadi pusat pengiriman kayu, karet, dan batu bara domestik dan internasional selama beberapa tahun. Dahulu bantaran sungai Banjarmasin berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan perekonomian. Seiring dengan kemajuan pembangunan di wilayah pedalaman, kendaraan dan sepeda motor mulai menggantikan kayak. Alih-alih menjadi pusat aktivitas, kawasan bantaran sungai kini menjadi halaman belakang rumah. Jalan sekarang berfungsi sebagai sarana akses utama ke kota. Aliran sungai yang menyempit secara signifikan menunjukkan bahwa kualitas sungai semakin menurun.<sup>1</sup>

Tabel 4.1

Statistik Dasar Kota Banjarmasin

Area	98,46km <sup>2</sup>
Populasi	692.793 orang
Kepadatan	7.036 orang/km <sup>2</sup>
Kecamatan	5 kecamatan
Kelurahan	52 kelurahan
Rukun Warga	117 Rukun Warga
Rukun Tetangga	1.657 Rukun Tetangga

<sup>1</sup> “Sejarah Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin* (blog), diakses 26 Februari 2024, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html>.

Jumlah Disabilitas	3.897
--------------------	-------

#### Data Disabilitas

Jumlah Disabilitas	3.897
Rasio	0,56% penduduk Kota Banjarmasin merupakan penyandang disabilitas
Jumlah Disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Barat	1.052
Jumlah Disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Selatan	1.190
Jumlah Disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Tengah	490
Jumlah Disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Timur	579
Jumlah Disabilitas di Kecamatan Banjarmasin Utara	586
Perempuan Disabilitas	47,1% atau 1.836
Laki-Laki Disabilitas	52,9% atau 2.061

Sumber: Survei Kota Ramah Disabilitas Banjarmasin (2018)

#### B. Penyajian Data

Berdasarkan temuan wawancara tatap muka yang dilakukan peneliti terhadap sembilan orang penyandang disabilitas dari komunitas HWDI Kota

Banjarmasin dan enam orang pegiat disabilitas dari Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin yang diwawancarai oleh peneliti antara 6 dan 17 Desember 2023.

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

a. Informan Pertama<sup>2</sup>

Nama : Barniah

Usia : 50 Tahun

Jenis Disabilitas : Daksa

Jabatan : Ketua HWDI Kota Banjarmasin

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Belum sepenuhnya, tetapi pihak Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menuju memenuhi aksesibilitas yang ada. Meskipun semua belum sesuai pada pemenuhan yang sesuai dengan standar yang berlaku, seperti *guiding block* itu masih belum pas, sejauh ini cukup baik.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk puskesmas sudah beberapa yang sudah akses dan juga untuk kecamatan tidak keseluruhan belum semua juga dapat akses dengan baik bagi penyandang disabilitas.”

---

<sup>2</sup> Wawancara dilakukan pada 6 Desember 2023

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian informan menjawab, “Sebaiknya untuk tempat-tempat publik itu dipenuhi setidaknya bisa melibatkan pihak disabilitas itu sendiri, agar bisa mengetahui apa yang kami perlukan dan kami butuhkan agar tidak adanya pembuangan dana yang sia-sia. Sebelumnya ada dilibatkan pada perencanaan akan tetapi saat pelaksanaan di lapangan tidak dilibatkan dan berakhir tidak sesuai dan menimbulkan hasil yang tidak sesuai.”

b. Informan Kedua<sup>3</sup>

Nama : Slamet

Usia : 52 Tahun

Jenis Disabilitas : Netra

Jabatan : Ketua PPDI Kota Banjarmasin

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Dikatakan memenuhi cukup memenuhi tapi dilihat kembali karena katanya anggaran terbatas, tapi belum sepenuhnya dan belum sesuai standar dan untuk nilainya itu sendiri cukup baik bagi difabel itu sendiri.”

---

<sup>3</sup> Wawancara dilakukan pada 6 Desember 2023

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Kondisi walaupun ada layanan dari segi fisik maupun nonfisik sudah ada tapi memang belum memenuhi seperti yang diharapkan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Secara pelayanan juga masih belum bisa diprioritaskan dan sulit mendapatkan pelayanan yang baik.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Mengenai aksesibilitas sudah pasti harus ditingkatkan dan dipenuhi dengan baik, dan melibatkan disabilitas langsung dari awal hingga akhir, dan untuk pelayannya juga memperbanyak *mainstreaming* (pengarusutamaan) terkait interaksi kepada difabel itu sendiri.”

c. Informan Ketiga<sup>4</sup>

Nama : Achmad

Usia : 45 Tahun

Jenis Disabilitas : Daksa

Jabatan : Anggota PPDI Kota Banjarmasin

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan pada 10 Desember 2023

memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk aksesibilitas di Banjarmasin sudah terakomodir semua dan sudah dapat terpenuhi semua dan dinilai cukup baik walaupun beberapa kekurangan itu dapat terpenuhi dengan hak-hak bagi difabel yang terpenuhi, dan pemerintah dinilai peduli pada keperluan akses bagi penyandang disabilitas.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk di puskesmas sudah cukup baik pelayanannya dan lebih baik daripada pelayanan sebelumnya, sebagai contoh Puskesmas Pelambuan menjadi contoh puskesmas ramah disabilitas yang mana sebelumnya sudah digaungkan dan sudah direalisasikan, hingga saat ini hampir seluruh puskesmas dapat memberikan pelayanan fisik yang memadai. Akan tetapi, dari segi nonfisik masih belum sepenuhnya memadai sebagai contoh Juru Bahasa Isyarat.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Karena sudah banyak aksesibilitas yang terbangun diharapkan adanya penyempurnaan pada sector yang memberikan pelayanan untuk difabel maupun lansia dan dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan daerah (perda) yang telah diatur, sebagai contoh dalam ranah kepolisian saat ini masih belum terjangkau, dan untuk pelayanan Pendidikan juga dinilai masih kurang. Selain itu, diharapkan pembangunan aksesibilitas tidak hanya

mementingkan unsur estetika, tetapi lebih mengutamakan pada fungsi dan penggunaan untuk penyandang disabilitas itu sendiri.”

d. Informan Keempat<sup>5</sup>

Nama : Hamsani

Usia : 48 Tahun

Jenis Disabilitas : Netra

Jabatan : Ketua PERTUNI Kota Banjarmasin

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk fasilitas di Banjarmasin belum baik, tetapi dinilai menuju ke arah baik. Contoh paling nyata pada *guiding block* yang dapat dirasakan tidak ada yang sempurna dan dapat menyebabkan bahaya. Penggunaan *guiding block* juga dinilai tidak sesuai pada penggunaannya dan sosialisasi terkait penggunaan, walaupun sekarang sudah mengalami peningkatan pada akses bagi difabel. Akan tetapi dinilai cukup saja untuk adanya perhatian saat ini meskipun belum sempurna karena belum adanya keterlibatan secara nyata dari pihak difabel secara langsung.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk pelayanan sudah

---

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan pada 10 Desember 2023

cukup baik walaupun belum cukup baik, walaupun belum semua pelayanan nonfisik baik. Namun, jika di beberapa tempat sudah mengetahui terkait interaksi dengan difabel akan sangat memprioritaskan dan melayani dengan baik dan di beberapa pelayanan publik lainnya juga dinilai lumayan baik. Di Kecamatan pun hingga saat ini ada beberapa yang masih kurang ramah karena belum paham dan beberapa pelayanan di kecamatan sudah bagus dan juga pelayanan di kantor pos juga sudah memberikan pelayanan yang baik. Membandingkan dengan tingkat kota dan desa, di tingkat kota sudah lebih maju terhadap pelayanan dan lebih ramah dibandingkan di desa.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Kota Banjarmasin yang dilabeli ‘Kota Ramah Disabilitas’ masih menjadi tanda tanya bagaimana bentuk ramahnya itu sendiri, termasuk pada bidang pekerjaan, rumah dan fasilitas yang benar-benar akan dipakai oleh disabilitas yang mana itu memang khusus untuk disabilitas bukan terbuka untuk umum. Walaupun sudah dilibatkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diharapkan semua ragam dapat menyuarakan terkait apa saja kebutuhannya dan kebutuhan agar bisa direalisasikan dengan baik dan sesuai.”

e. Informan Kelima<sup>6</sup>

Nama : Ninda

---

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan pada 17 Desember 2023

Usia : 38 Tahun  
Jenis Disabilitas : Netra  
Jabatan : Sekretaris PERTUNI Kota Banjarmasin

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Kalau untuk secara penuh belum, tetapi untuk adanya aksesibilitas dinilai sudah ada meskipun dinilai masih belum memenuhi sesuai syarat jika dihitung persentase sekitar 50% dari pemenuhan hak itu sendiri.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk sekarang sudah mulai bagus dan untuk pelayanan itu sendiri masih banyak yang kurang ramah dan ketus terhadap difabel, tetapi pelayanan untuk di puskesmas sudah dinilai baik.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Kalau ingin membangun lagi untuk aksesibilitas kita juga dilibatkan secara nyata karena penggunanya adalah kita, dan diharapkan dari awal hingga akhir kita bisa ikut memberikan saran mulai dari tahap perencanaan, bukan setelah selesai pembangunan akses itu sendiri.”

f. Informan Keenam<sup>7</sup>

Nama : Maria  
Usia : 25 Tahun  
Jenis Disabilitas : Daksa

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Sudah memadai, tetapi masih banyak kekurangannya terutama pada ramp (tanjakan ke atas untuk kursi roda) dan masih belum sesuai standar.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk pelayanan public itu aksesibilitasnya sudah baik di bagian pelayanan publik seperti puskesmas di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Semoga bisa lebih bagus, lebih merata dan dapat diakses bisa diakses dengan mudah dan mandiri dan bisa memadai untuk penyandang disabilitas itu sendiri.”

g. Informan Ketujuh<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan pada 17 Desember 2023

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan pada 17 Desember 2023

Nama : Fahmi  
Usia : 28 Tahun  
Jenis Disabilitas : Daksa  
Jabatan : Pengurus PPDI Kalimantan Selatan

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah pemerintah Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam kondisi yang baik dan memadai?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk memenuhi sudah cukup dan juga memadai, tetapi masih perlu disesuaikan lagi dan belum merata pada penyebaran aksesibilitas dan pihak pemerintah dinilai tanggap untuk mengatasi kurangnya akses karena terlalu terburu-buru sehingga masih belum bisa dinilai baik.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana kondisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik di bagian pelayanan publik di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk pelayanan sesuai dengan kondisi disabilitasnya masih belum sesuai dan belum bisa mandiri terhadap apa keperluan mereka dan untuk aksesibilitas itu sendiri sebenarnya untuk memberikan kemandirian dalam aksesnya sesuai dengan makna inklusi, secara pemenuhan dalam ragam disabilitasnya itu sendiri masih belum terpenuhi. Meskipun sudah memenuhi, tetapi tidak memenuhi semuanya. Dalam konsep inklusi bisa dipertimbangkan kembali terkait regulasi yang akan diberlakukan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Kalau berdasarkan kendalanya agar dapat ditangani dengan serius agar aksesibilitas dapat terpenuhi dengan baik dan dapat melibatkan penyandang disabilitas dari awal perencanaan hingga akhir agar dapat memberikan hasil yang sesuai.”

h. Informan Kedelapan

Nama : Putri Salma Yulianti, S.Pd.

Usia : 24 Tahun

Posisi : Bendahara

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Saya rasa fasilitas aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin hanya dilakukan secara formalitas, tidak sesuai prosedur sehingga tidak berfungsi dengan baik. Contoh dari pemasangan guiding block yang salah,, jalan untuk kursi roda yang terlalu curam, dan lain-lain. Namun, ada beberapa juga yang baik, seperti di Hotel Aria Barito cukup bagus dan di lift-nya juga ada tulisan braille (sistem tulisan sentuh untuk tunanetra). Selain itu, saya kurang tahu.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Menurut Anda apakah disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak

aksesibilitas?” Kemudian, informan menjawab, “Belum sepenuhnya karena masih disabilitas di Kota Banjarmasin masih kurang mendapatkan haknya.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Semoga fasilitas semakin ditingkatkan dan dana atau anggaran untuk fasilitas aksesibilitas lebih ditingkatkan.”

i. Informan Kesembilan

Nama : Firdaus Nuzula, S.Pd.

Usia : 24 Tahun

Posisi : Anggota

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Untuk aksesibilitas ruang publik yang ada di Kota Banjarmasin, ada yang memadai, tetapi tidak sedikit yang masih belum memadai, baik itu aksesibilitas fisik maupun non fisik.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Menurut Anda apakah disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas?” Kemudian, informan menjawab, “Saya rasa belum sepenuhnya mendapatkan haknya karena aksesibilitas yang tersedia pun masih ada yang belum memadai untuk penyandang disabilitas.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas

di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Harapannya agar Kota Banjarmasin lebih melibatkan penyandang disabilitas dalam pengawasan pembangunan aksesibilitas. Mereka tidak hanya diikuti dalam Musrenbang saja, tetapi dari tahap perencanaan, proses, sampai evaluasi juga melibatkan penyandang disabilitas sebagai pihak pengawasnya agar pembangunan aksesibilitas yang direncanakan sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan memadai.”

j. Informan Kesepuluh

Nama : Muthia Khalishah

Usia : 20 Tahun

Posisi : Anggota

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Menurut saya, aksesibilitas di Kota Banjarmasin masih dikatakan kurang dalam segi kebermanfaatan untuk penyandang disabilitas, serta kurangnya edukasi tentang bagaimana penyandang aksesibilitas yang baik untuk warga Kota Banjarmasin.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Menurut Anda apakah disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas?” Kemudian, informan menjawab, “Sulit untuk mengatakan apakah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas dengan baik. Namun, secara ideal, hak aksesibilitas harus dijamin bagi semua individu, tanpa kecuali.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Saya harap pemerintah Kota Banjarmasin dapat terus meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan mengadopsi kebijakan yang inklusif dan melakukan perbaikan infrastruktur yang diperlukan, seperti penambahan rampa, tanda-tanda braille, dan transportasi publik yang ramah disabilitas.”

k. Informan Kesebelas

Nama : Berliana Nurwidhad, S.Pd.

Usia : 24 Tahun

Posisi : Anggota

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Menurut saya sudah cukup ada dan diperhatikan oleh pemerintah, salah satu contoh yang bisa dilihat, yaitu pembangunan gedung yang ada aksesibilitasnya terlebih untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, transportasi umum yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, guiding block di trotoar jalan dan mungkin masih banyak lagi. Dari situ juga dapat dilihat bahwa pemerintah sudah ada perhatian untuk aksesibilitas di Kota Banjarmasin.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Menurut Anda apakah disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas?” Kemudian, informan menjawab, “Menurut saya sudah

sebagian terpenuhi, tetapi masih ada beberapa yang belum sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas. Untuk itu, pemerintah harus lebih tajam dan memperhatikan lagi untuk hak aksesibilitas penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin agar semuanya terpenuhi.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Saran untuk pemerintah Kota Banjarmasin agar lebih tajam dan diperhatikan lagi untuk hak-hak aksesibilitas yang ada dan harapannya aksesibilitas yang sudah ada semoga membantu aktivitas dan mempermudah penyandang disabilitas dalam kesehariannya.”

#### 1. Informan Keduabelas

Nama : Periyadi, S.Pd.

Usia : 24 Tahun

Posisi : Anggota

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Masih belum terakses dengan baik, walaupun beberapa fasilitas diklaim ramah disabilitas, tetapi kenyataannya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Menurut Anda apakah disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas?” Kemudian, informan menjawab, “Tentu tidak karena banyak

fasilitas tidak bisa digunakan. Ada hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dan hanya dianggap sebagai objek mendapatkan suara ketika memasuki kontestasi politik. Sehingga aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin hanya angan-angan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Saya hanya bisa memberikan saran agar pemerintah melibatkan disabilitas, tidak hanya saat peresmian, tetapi ketika perencanaan, pembuatan, sampai evaluasi dan pemeliharaan. Mereka dilibatkan secara aktif dalam segala pembangunan.”

m. Informan Ketigabelas

Nama : Maudya Pramitha

Usia : 20 Tahun

Posisi : Anggota

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Aksesibilitas di Kota Banjarmasin sudah terlihat dengan bukti banyaknya di fasilitas publik. Namun, masih ada aksesibilitas yang belum bisa digunakan dengan baik karena adanya aksesibilitas, seharusnya diperuntukan untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, fasilitas tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap dan hiasan kota.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Menurut Anda apakah disabilitas di Kota Banjarmasin sudah sepenuhnya mendapatkan hak

aksesibilitas?” Kemudian, informan menjawab, “Belum sepenuhnya penyandang disabilitas dapat menikmati aksesibilitas dengan baik karena adanya kesenjangan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, dan pelayanan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah Anda memiliki saran atau harapan terkait perbaikan atau peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas di Kota Banjarmasin?” Kemudian, informan menjawab, “Adanya harapan perbaikan, terutama peningkatan SDM di bidang pelayanan masyarakat/publik. Hak aksesibilitas fisik di bidang publik perlu melibatkan penyandang disabilitas karena peran mereka sangat diperlukan sehingga penggunaannya tepat sasaran.”

No.	Hak Aksesibilitas	Kendala dan Dampak
1	Masih belum terpenuhi karena terlihat dari fasilitas aksesibilitas yang belum memadai, seperti pemasangan guiding block yang tidak sesuai dengan prosedur, fungsi pembangunan fasilitas aksesibilitas tidak maksimal, hingga kurang maksimalnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan fasilitas aksesibilitas.	Tidak maksimalnya fasilitas aksesibilitas sehingga berdampak kepada penyandang disabilitas yang menimbulkan kendala tersendiri, yaitu kurang produktif dalam beraktivitas. Sehingga penyematan julukan Kota Ramah Disabilitas untuk Kota Banjarmasin masih belum layak.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

### C. Analisis Data

#### 1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi Rumah Disabilitas

Berbicara mengenai hak aksesibilitas bagi individu penyandang disabilitas, tentu saja individu tersebut lebih mengetahui ketentuan aksesibilitas di Kota Banjarmasin. Pasal 47–49 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas hak aksesibilitas tertentu, termasuk penggunaan prasarana dan sarana umum (Pasal 47 ayat (1)), penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik (Pasal 47 ayat (2)), aksesibilitas bangunan umum dan jalan umum (Pasal 48), pelayanan informasi dan pelayanan khusus (Pasal 49 ayat (1)), bangunan umum beserta fasilitasnya, sarana lalu lintas angkutan dan angkutan umum (Pasal 49 ayat (2)).

Pemerintah Kota Banjarmasin selaku stakeholder atau pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas harus melaksanakan perda di atas. Sebagaimana yang telah peneliti lakukan wawancara kepada penyandang disabilitas, ada rasa kurang puas yang didapatkan dari adanya hak aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Meskipun perda tersebut telah disahkan sejak 11 tahun lalu, tetapi belum sampainya tingkat kepuasan penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak aksesibilitas menjadikan hal ini belum terakses dan terlaksana dengan baik.

Barniah, selaku penyandang disabilitas daksa, menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin belum sepenuhnya melaksanakan hak aksesibilitas. Namun, Barniah meyakini bahwa sedang dalam tahap menuju lebih baik dengan sesuai standar dengan adanya guilding block yang belum

tepat. Begitu juga yang dikatakan oleh Slamet penyandang disabilitas netra yang menyebutkan bahwa masih ada hak aksesibilitas yang belum cukup baik karena adanya anggaran terbatas. Sehingga Slamet sebagai penyandang disabilitas atau objek dari adanya hak aksesibilitas yakin bahwa apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dirasakan. Di lain sisi, Achmad penyandang disabilitas daksa juga menilai bahwa sebenarnya hak aksesibilitas di Kota Banjarmasin bagi penyandang disabilitas sudah mengakomodir dan memenuhi sehingga Achmad menilai cukup baik. Meskipun Achmad juga menyadari bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih terdapat kekurangan sehingga masih ada hak-hak bagi penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Achmad berharap bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin lebih peduli lagi dalam perihal hak aksesibilitas.

Adapun Hamsi penyandang disabilitas netra mengatakan bahwa fasilitas aksesibilitas di Kota Banjarmasin belum cukup baik, tetapi sudah melangkah menjadi lebih baik. Salah satu contohnya ialah adanya guilding block yang tidak sempurna dan dapat membahayakan penyandang disabilitas. Selain itu, pengguna guilding block tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya sosialisasi. Hamsi menilai bahwa sudah seharusnya guilding block hanya digunakan oleh para penyandang disabilitas, bukan untuk masyarakat umum. Ninda penyandang disabilitas netra juga menilai bahwa belum sepenuhnya hak aksesibilitas dirasa memadai karena jika dihitung, hanya sekitar 50% hak aksesibilitas yang telah terpenuhi di Kota Banjarmasin. Penilaian lain juga diberikan oleh Maria penyandang disabilitas daksa yang menilai bahwa

meskipun hak aksesibilitas sudah memadai, tetapi masih ada kekurangan dalam hal hak aksesibilitas seperti kurangnya jumlah ramp (tanjakan ke atas untuk kursi roda), bahkan masih belum sesuai standar. Terakhir, Fahmi penyandang disabilitas daksa mengatakan bahwa akses bagi penyandang disabilitas sudah cukup dan juga memadai. Namun, sekali lagi bahwa masih perlu ada yang ditingkatkan karena pemerataan belum terlaksana sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin masih kurang bisa mengatasi ketidaksempurnaan akses yang belum terpenuhi karena terburu-baru dalam membangun hak aksesibilitasnya.

Pendapat tentang fasilitas aksesibilitas tidak hanya dikomentari oleh penyandang disabilitas saja, tetapi komunitas yang bergerak di bidang disabilitas juga menyoroti kurangnya fasilitas aksesibilitas di Kota Banjarmasin. Putri Salma, selaku bendahara Yayasan Pensil Waja Banua, mengatakan bahwa fasilitas aksesibilitas yang ada di Kota Banjarmasin hanya dibangun sebagai formalitas. Hal ini disebabkan pembangunan yang ada seperti *guiding block* banyak yang dipasang tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan *guiding block* tidak berfungsi.

Namun, Putri Salma cukup mengapresiasi Hotel Aria Barito memiliki tulisan braille, yaitu sistem tulisan sentuh untuk tunanetra. Begitu juga pendapat Firdaus, selaku anggota yayasan yang menyayangkan masih kurang memadainya fasilitas aksesibilitas di Kota Banjarmasin, tidak hanya fasilitas aksesibilitas fisik, melainkan juga non fisik. Komentar lain juga datang dari anggota lain, seperti Muthia, Berliana, Periyadi, dan Maudya yang mengatakan bahwa selain kurang memadainya sarana aksesibilitas, masyarakat umum juga

tidak mengetahui bahwa seharusnya banyak fitur aksesibilitas, seperti blok-blok di trotoar, dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas namun tidak selalu dipelihara dengan baik. Akan tetapi, informan tidak menyangkal bahwa ada beberapa fasilitas yang sudah cukup baik, baik berupa bangunan maupun transportasi umum. Dengan kurangnya fasilitas aksesibilitas ini, menurut Maudya, dapat mengganggu penyandang disabilitas dalam beraktivitas yang berujung pada kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, penggunaan fasilitas publik, dan pelayanan.

Jika mengacu Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa salah satu hak yang seharusnya didapatkan penyandang disabilitas ialah hak aksesibilitas. Namun, sebagaimana seluruh pemaparan informan, tidak ada kepuasan akibat kurang memadainya. Hal ini berdampak pada ketidakmandirian penyandang disabilitas dan ketidakgunaan fasilitas aksesibilitas karena tidak sesuai dengan Asas Fasilitas dan Aksesibilitas.

Adapun salah satu fasilitas aksesibilitas yang diapresiasi oleh penyandang disabilitas ialah puskesmas. Sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,

“Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Meskipun masih ada banyak puskesmas yang belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang baik, tetapi dalam pelayanan kesehatan sudah lebih baik

daripada pelayanan yang lain, sesuai dengan isi pasal di atas. Hanya saja, saran dari penyandang disabilitas untuk puskesmas ialah adanya keharusan menyediakan juru bahasa isyarat, terutama bagi tunawicara.

## **2. Dampak dan Kendala bagi Penyandang Disabilitas terhadap Aksesibilitas Publik di Kota Banjarmasin**

Dampak dan kendala yang dirasakan penyandang disabilitas akibat tidak maksimalnya aksesibilitas menimbulkan saran dan harapan tersendiri untuk Pemerintah Kota Banjarmasin. Bainah, salah satu penyandang disabilitas mengatakan bahwa sudah seharusnya para penyandang disabilitas ikut serta dilibatkan dalam pembangunan fasilitas aksesibilitas. Sebab sebagai penyandang disabilitas yang akan menggunakan fasilitas aksesibilitas, Barniah jelas merasa jika mereka dilibatkan, maka pembangunan akan sesuai kebutuhan. Jika tidak dilibatkan lagi, maka akan terulang lagi tidak maksimalnya fasilitas aksesibilitas. Kemudian, Slamet menambahkan pendapat Barniah bahwa keterlibatan mereka tidak hanya pada proses pembangunan, tetapi sejak awal hingga akhir. Dengan demikian, ada interaksi dan tersambungny komunikasi antara pihak pemangku kepentingan dan subjek kepentingan fasilitas aksesibilitas. Tujuan ini juga sebagai upaya menghindari kendala yang ada berupa kesulitan yang selama ini dirasakan oleh penyandang disabilitas sehingga mereka menjadi pengarusutamaan dalam masalah fasilitas aksesibilitas.

Achmad juga memberikan pendapat bahwa fasilitas aksesibilitas yang ada, yang kurang sempurna, diharapkan dapat disempurnakan oleh Pemerintah

Kota Banjarmasin, seperti sektor pelayanan publik kepada penyandang disabilitas, juga kepada lansia. Catatan penting juga disampaikan oleh Achmad bahwa jika tidak ingin lagi terjadi kendala pada fasilitas aksesibilitas yang ada, maka jangan hanya mementingkan unsur keindahan fasilitas aksesibilitasnya. Akan tetapi, hal terpenting ialah bagaimana fungsi fasilitas aksesibilitas itu benar-benar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, anggaran pembangunan tidak akan menjadi sia-sia. Hamsani juga menyayangkan dengan adanya penyematan 'Kota Ramah Disabilitas' untuk Kota Banjarmasin, tetapi masih dipertanyakan, apa bentuk dan contoh sisi ramahnya untuk penyandang disabilitas? Hamsani menyinggung bahwa penyematan julukan itu tercoreng karena kebanyakan fasilitas aksesibilitas justru digunakan oleh masyarakat umum, seperti *gilding block* yang tertutup spanduk orang berjualan, menjadi tempat parkir kendaraan bermotor, bahkan juga terhalang pohon. Oleh karena itu, masuk akal jika penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Sebenarnya ada empat faktor yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: partisipasi penuh, aksesibilitas, ketersediaan layanan hak, dan sikap inklusif. Seperti semua hal di atas, sulit untuk menentukan apakah Banjarmasin bisa dianggap sebagai kota yang inklusif dan ramah disabilitas.

Sisanya, responden lain juga mengharapkan adanya meminimalisir kendala dalam pembangunan dengan melibatkan penyandang disabilitas, bahkan sejak musrembang. Jika dicermati, maka sebagaimana konsep kota

inklusif menurut Hambleton bahwa pemerintah harus melakukan pembangunan fasilitas aksesibilitas dengan pendekatan progresif. Hal ini sebagai upaya dan bentuk dari demokrasi dengan menjalin aliansi luas dan tanpa batas antara pemerintah, masyarakat, korporasi, dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mewujudkan kota inklusif.

Dukungan datang dari Yayasan Pensil Waja Banua, sebagai salah satu yayasan sekaligus komunitas yang berfokus pada hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Putri Salma mengharapkan agar tidak terjadi kendala terulang, maka pemerintah dapat menganggarkan ulang dana untuk fasilitas aksesibilitas. Begitu juga dengan Firdaus yang mengharapkan dengan adanya anggaran yang tepat, maka segala tujuan dan kebutuhan penyandang aksesibilitas akan berdampak baik pada fasilitas aksesibilitas sehingga dapat dikatakan memadai. Apabila berkaca pada Pasal 3 huruf e Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,

“Memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.”

Maka akan didapatkan dampak dari fasilitas aksesibilitas yang tepat akan meningkatkan produktivitas penyandang disabilitas. Selain itu, Muthia juga berharap, kendala yang telah ada dapat ditutupi dengan adanya penambahan rampa, tanda-tanda braille, dan transportasi publik yang ramah disabilitas. Terakhir, responden lainnya juga berpendapat bahwa sudah seharusnya sejak sekarang Pemerintah Kota Banjarmasin kembali merangkul

ulang penyandang disabilitas agar terlibat aktif dalam segala pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas aksesibilitas